

**Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam
Program *Neighborhood Upgrading And Shelter Project* (NUSP)
Menuju Pembangunan Berkelanjutan di Wilayah Kumuh
(Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kelurahan Bram Itam Kiri)**

Yurizal Nurzen, Muhammad Safri, Nazarudin

Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Universitas Jambi
Jl. A Manaf Telanaipura Jambi 36124
Email: jeansipil@yahoo.com

ABSTRAK

Kebijakan nasional untuk pengentasan permukiman kumuh dalam RPJMN Tahun 2015-2019 adalah program 100-0-100. Bertolak dari kebijakan tersebut pemerintah melalui Kemenpuera meluncurkan program NUSP yang konsen terhadap pengentasan kekumuhan namun berbasis kepada partisipasi masyarakat dengan harapan program tersebut berdasarkan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan tujuan kebijakan pemerintah. Adapun tujuan penelitian adalah 1) Mengidentifikasi bentuk partisipasi masyarakat dalam program NUSP di wilayah kumuh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kelurahan Bram Itam Kiri, 2) Menganalisis tingkat partisipasi masyarakat dalam program NUSP di wilayah kumuh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kelurahan Bram Itam Kiri, 3) Menganalisis faktor-faktor apa yang mempengaruhi tingkat partisipasi dalam program NUSP di wilayah kumuh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kelurahan Bram Itam Kiri. Metode yang digunakan adalah metode survey dengan pengambilan sampel secara *Proportionate stratified random sampling*, dimana jumlah sampel sebanyak 39 responden. Penentuan jumlah sampel mempergunakan metode *Slovin* dengan pengolahan data secara deskriptif. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa partisipasi masyarakat dalam program NUSP Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kelurahan Bram Itam Kiri dari segi bentuk yang paling dominan adalah partisipasi dalam bentuk fisik (tenaga) yaitu 27%, dari segi tingkat partisipasi yang paling tinggi adalah partisipasi pada tingkat pelaksanaan yaitu 33%. Faktor Internal Masyarakat di tinjau dari segi: usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan dan penghasilan/pendapatan. Dari faktor usia partisipasi yang paling dominan adalah masyarakat dengan kisaran umur 30-39 tahun yaitu 48.7%, faktor jenis kelamin yang terbesar adalah laki-laki dengan jumlah 71.8%, faktor pendidikan partisipasi terbanyak pada tingkat pendidikan SD-SMP/MTS 51.3%, faktor pekerjaan sebagian besar yaitu bekerja sebagai petani 41.0%, dari faktor penghasilan di dominasi oleh masyarakat berpenghasilan Rp.1.500.000-2.500.000 yaitu 48.7%. Faktor eksternal kepemimpinan stakeholder yang mendorong partisipasi masyarakat yaitu 38.5% tergolong aktif.

Kata Kunci: kawasan kumuh, partisipasi masyarakat, NUSP, bentuk partisipasi, tingkat partisipasi, faktor-faktor pengaruh partisipasi.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemukiman kumuh (*slumarea*) adalah daerah yang sifatnya kumuh tidak beraturan yang terdapat di daerah perkotaan. Pemukiman kumuh ini ditandai oleh sejumlah ciri-ciri antara lain adalah banyak dihuni oleh pengangguran, tingkat kejahatan/kriminalitas tinggi, demoralisasi tinggi, emosi warga tidak stabil, miskin dan berpenghasilan rendah, daya beli rendah, kotor, jorok, tidak sehat dan tidak beraturan, warganya adalah kaum migran yang bermigrasi dari desa ke kota, fasilitas publik sangat tidak memadai, kebanyakan warga *slum* yang bekerja sebagai pekerja kasar dan serabutan, bangunan rumah kebanyakan gubuk-gubuk dan rumah semi permanen, Waston, M (2013: 40).

Kebijakan nasional untuk pengentasan permukiman kumuh dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 adalah program 100-0-100 yaitu: 100% akses air minum, 0 % kawasan kumuh perkotaan dan 100% akses sanitasi. Dilanjutkan RPJMN Tahun 2005-2025 yaitu, “Kota Tanpa Kumuh 2025” dan rencana RPJMN 2030 yang terdapat dalam target SDGs (*Sustainable Development Goals*) yaitu perumahan dan pelayanan dasar layak, aman, dan terjangkau untuk semua, termasuk peningkatan kualitas permukiman kumuh. Manajemen perencanaan permukiman yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan mengedepankan partisipasi masyarakat, Akses universal dan pemerataan terhadap air minum yang terjangkau, Akses universal dan pemerataan terhadap sanitasi layak, bebas BABS, dengan memperhatikan kesetaraan gender (Direktur Permukiman dan Perumahan, Kementerian PPN/Bappenas, 2016:208).

Mengingat keterbatasan dana APBN dan dalam rangka mendukung upaya mewujudkan kota bebas kumuh pada tahun 2020, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum telah menyiapkan *Neighborhood Upgrading and Shelter Project* (NUSP) dengan menggunakan dana pinjaman dari *Asian Development Bank* (ADB). Program NUSP merupakan pengembangan dari Program NUSSP (*Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project*) yang telah dilaksanakan pada tahun 2005–2010. Program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project* (NUSP) merupakan salah satu program strategis untuk mendukung upaya mengurangi kawasan kumuh di perkotaan hingga 0%. Penyelenggaraan program dan kegiatan NUSP dilaksanakan selama 3 (tahun) yaitu pada tahun 2015-2017 (Direktorat Jenderal Cipta Karya–Kementerian Pekerjaan Umum, 2015:42).

Tujuan penyelenggaraan kegiatan NUSP adalah meningkatkan kualitas hunian, fungsi sarana dan prasarana serta utilitas umum pada kawasan permukiman kumuh melalui kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta secara mandiri dan berkelanjutan serta berpihak pada kebutuhan masyarakat miskin di perkotaan. Dalam upaya peningkatan kualitas kawasan/lingkungan permukiman kumuh tersebut, program NUSP telah menetapkan strategi dan pendekatan yang sesuai dengan arah kebijakan dan strategi penanganan permukiman kumuh nasional. Strategi dan pendekatan pelaksanaan program/kegiatan NUSP diarahkan untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, membangun kesadaran dan peran masyarakat didalam penanganan permukiman kumuh, serta membangun kelembagaan penanganan kumuh di pusat dan daerah. Melalui NUSP proses pembangunan akan dimulai pada kelurahan yang memiliki area kumuh sebagai *nuclear spot area* selanjutnya diperluas pada area

lain dikelurahan yang sama dan selanjutnya dapat dikembangkan di seluruh wilayah kota/kabupaten (*National Management Consultant NUSP*, 2014:35).

Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi akan lebih memudahkan bagi pemerintah untuk melaksanakan program pembangunan yang akan dilaksanakan, sebab dukungan masyarakat merupakan modal bagi pemerintah untuk melaksanakan programnya. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam beberapa hal, antara lain: Partisipasi dalam perencanaan, partisipasi dalam pelaksanaan operasional, dan Partisipasi dalam evaluasi/ monitoring dan partisipasi dalam menerima hasil (Kunarjo 2002:63).

Pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat mempunyai karakteristik *bottom-up*, demikian halnya dengan proses pengambilan keputusan, karena masyarakatlah yang mengetahui kebutuhan dan masalah yang dihadapi, masyarakatlah yang memiliki kebebasan untuk memutuskan pelaksanaan suatu kegiatan pembangunan. Pendekatan yang melibatkan masyarakat inidisadari penting, karena permasalahan pembanguan yang ditangani oleh suatu negara atau permasalahan pembangunan dalam skala kota sekalipun, masih terlalu luas untuk ditangani. Salah satu alternatif penanganan masalah pembangunan sudah semestinya diturunkan menjadi penanganan skala unit lingkungan , karena pada skala tersebut masyarakat justru sangat akrab dengan rutinitas masalah yang dihadapi langsung (Wahyudi & Prakosa, 2008; 15).

Proses ini merupakan hal yang sangat penting dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Partisipasi menyiratkan pemecahan masalah yang kooperatif. Melalui pendekatan partisipatif tampak terlibatnya penduduk dalam proses pengambilan keputusan dalam komunitas tersebut dan dalam implementasi serta evaluasi dari peraturan-peraturan, perencanaan dan program-program. Hal ini mengidentifikasi bahwa masyarakat akan ikut menerima tanggung jawab bersama untuk keberlanjutan pembangunan tempat tinggal mereka. Sehingga pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang kuat, lingkungan yang serasi, tingkat sosial yang relatif setara penuh keadilan, kadar peran serta masyarakat yang tinggi, dan konservasi energi yang dengan baik akan dapat di wujudkan.

Melalui program ini pemerintah daerah ditunjuk sebagai penyelenggara wewenang penyelenggaraan penataan ruang, yang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang, yang didasarkan pada pendekatan wilayah dengan batasan wilayah administratif. Di Indonesia terdapat 19 wilayah yang terbagi dalam 16 provinsi teridentifikasi permukiman kumuh dan sekaligus menjadi sasaran dari program NUSP, diantaranya Makasar, Palopo, Bone, Kendari Ambon, Semarang, Pekalongan, Pasuruan, Serang, Sukabumi, Banjarmasin, Kapuas, Palangkaraya, Bengkulu, Batam, Tanjung Jabung Barat, Palembang, Tanjung Balai, dan Provinsi Lampung (Direktorat Jenderal Cipta Karya–Kementerian Pekerjaan Umum, 2015).

Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah salah satu Kabupaten/ Kota yang mendapatkan Program NUSP, Kawasan perkotaan yang berkembang di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah di ibukota kabupaten. Kawasan Perkotaan Kuala Tungkal sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan di Provinsi Jambi berkembang dengan pesat, yang dapat dilihat dari perkembangan kawasan terbangun. Perkembangan permukiman semakin cepat sehingga menjadi padat dan tidak tertata di Kawasan Perkotaan Kuala Tungkal. Permukiman umumnya menyatu dengan kegiatan perdagangan dan jasa. Kondisi permukiman diperburuk dengan keterbatasan dan

ketidakberfungsian prasarana lingkungan, sehingga mengalami penurunan kualitas dan mengarah menjadi permukiman kumuh.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Kabupaten/Kota diwajibkan untuk melakukan peningkatan kualitas permukiman kumuh, yang diawali melalui proses pendataan permukiman kumuh. Selain itu, pendataan permukiman kumuh perlu dilakukan dalam rangka mencapai target RPJPN Tahun 2005-2025 dan MDG's (Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, 2014).

Kawasan Kumuh di Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013-2033, Dokumen Buku Putih Sanitasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013, Dokumen SPPIP Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2012. Dari survei yang dilakukan, permukiman kumuh terdapat di Kawasan Perkotaan Kuala Tungkal dan ibukota Kecamatan Bram Itam dengan luas sekitar 115,41 Ha, dengan tingkat kekumuhan pada kondisi kumuh berat.

Program NUSP Kabupaten Tanjung Jabung Barat mulai dilaksanakan pada tahun 2015. Di Kelurahan Bram Itam Kiri sebagai salah satu lokasi sasaran program/kegiatan NUSP dimulai tahun 2016 dengan Luas wilayah 4.060 hektar dan memiliki kawasan/lingkungan permukiman kumuh seluas 10,88 hektar yang akan ditingkatkan kualitasnya melalui program/kegiatan NUSP. Jumlah penduduk di Kelurahan Bram Itam Kiri sebanyak 3.594 jiwa dan sebanyak 979 KK. Jumlah Penduduk miskin sebanyak 283 KK dengan sebaran lokasi kumuh terdiri dari seluruh wilayah permukiman penduduk RT. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 13 dan 14 (Profil Kelurahan Bram Itam Kiri, 2016).

Lokasi kawasan/lingkungan permukiman kumuh di Kelurahan Bram Itam Kiri berada pada pinggiran kota dengan karakteristik kawasan sekitar lokasi permukiman kumuh berupa kawasan perumahan, industri, dan berada pada tepi sempa dan sungai. Status kepemilikan lahan pada kawasan/lingkungan permukiman kumuh sebagian besar merupakan lahan milik warga, dimana status peruntukkan lahan adalah tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota. Kondisi infrastruktur jaringan jalan yang terdapat pada kawasan/lingkungan permukiman kumuh meliputi jalan lingkungan (lokal sekunder) dan jalan setapak dengan panjang jalan 900 m dalam kondisi yang pada umumnya rusak. Disamping jaringan jalan, pada lokasi kawasan/lingkungan permukiman kumuh juga terdapat jembatan penghubung. Sistem drainase pada kawasan/lingkungan permukiman hanya aliran anak sungai (Profil Kelurahan Bram Itam Kiri, 2016).

METODE PENELITIAN

a) Bentuk partisipasi masyarakat

Bentuk-bentuk partisipasi masyarakat merupakan wujud partisipasi yang diberikan oleh masyarakat terhadap program. Untuk mengetahui bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam program NUSP digunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan distribusi frekuensi. Adapun

indikatornya adalah sebagai berikut: 1. Partisipasi dalam bentuk buah pikiran/ keahlian, 2. Partisipasi dalam bentuk pembiayaan atau uang, 3. Partisipasi dalam bentuk tenaga/ fisik, 4. Partisipasi dalam bentuk material. Menganalisis bentuk partisipasi masyarakat dengan menggunakan kuesioner (12 pernyataan) dengan menggunakan Skala Likert, dengan pilihan: Sangat sering diberi nilai 5, Sering nilai 4, Kadang-kadang nilai 3, Jarang nilai 2, dan Tidak pernah nilai 1. Adapun rumus yang digunakan:

$$\text{Interval (I)} = \frac{\text{Range (R)}}{\text{Kategori (K)}}$$

Keterangan:

Range (R) : Jumlah skor tertinggi-jumlah skor terendah

Kategori(K): Banyaknya kelompok yang digunakan untuk skor tertinggi

Hasil interval variabel bentuk partisipasi adalah: $I = 12/5 = 2,4$. Dengan kategori: Kategori / kelompok 1 (tidak aktif): (3.0 – 5.3), kategori / kelompok 2 (kurang aktif): (5.4–7.7), kategori / kelompok 3 (cukup aktif): (7.8–10.1), kategori / kelompok 4 (aktif): (10.2–12.5), kategori / kelompok 5 (sangat aktif): (12.6–15.0)

b) Tingkat partisipasi masyarakat.

Adalah Partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan program merupakan keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan yang dilaksanakan. Adapun indikatornya adalah sebagai berikut: 1. Partisipasi pada tahap perencanaan, partisipasi pada tahap pelaksanaan, partisipasi pada tahap evaluasi/ monitoring, partisipasi pada tahap pemanfaatan hasil.

Untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam program *Neighborhood Upgrading and Shelter Project* (NUSP) yang terdiri dari 17 item pernyataan. Setiap jawaban dihubungkan dengan bentuk pernyataan atau dukungan sikap yang diungkapkan dengan kata-kata yaitu: sangat tinggi dengan nilai 5, tinggi 4, sedang 3, rendah 2 dan sangat rendah 1. Untuk memperoleh gambaran tentang kondisi setiap variabel secara tunggal dilakukan dengan tabel frekuensi dengan analisis deskriptif dengan menentukan skor interval. Tingkat partisipasi masyarakat dikategorikan menjadi 5, yaitu: sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah dan sangat rendah. Pengkategorian tersebut menggunakan skor interval. Untuk menentukan skor interval sebagai berikut:

$$\text{Interval (I)} = \frac{\text{Range (R)}}{\text{Kategori (K)}}$$

Range (R) : Jumlah skor tertinggi-jumlah skor terendah

Kategori(K) : Banyaknya kelompok yang digunakan untuk skor tertinggi

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Program *Neighborhood Upgrading And Shelter Project* (NUSP) Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Wilayah Kumuh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kelurahan Bram Itam Kiri yang paling dominan adalah partisipasi dalam bentuk tenaga yaitu 27%, dan tingkat distribusi keaktifan tertinggi masyarakat terhadap masing-masing bentuk partisipasi adalah : Partisipasi masyarakat dalam bentuk buah pemikiran / ide tergolong aktif dengan persentase 33.3 %, partisipasi masyarakat dalam bentuk sumbangan uang adalah responden lebih banyak memberikan penilaian cukup aktif yaitu 51.3%, partisipasi masyarakat dalam bentuk fisik (tenaga) tergolong aktif persentase 41.0%, dan partisipasi masyarakat dalam bentuk material (barang) tergolong cukup aktif dengan persentase 48.7%.

Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Program *Neighborhood Upgrading And Shelter Project* (NUSP) Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Wilayah Kumuh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kelurahan Bram Itam Kiri yang paling tinggi adalah partisipasi pada tahap pelaksanaan yaitu 33%, dan kategori tertinggi terhadap masing-masing tingkat partisipasi adalah: Tingkat partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan tergolong sangat tinggi 51.3%, tingkat partisipasi masyarakat pada tahap pelaksanaan tergolong sedang 46.2%, tingkat partisipasi masyarakat pada tahap evaluasi/monitoring tergolong sedang 51.3%, dan tingkat partisipasi masyarakat pada tahap pemanfaatan hasil tergolong sedang 43.6%,

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Program *Neighborhood Upgrading And Shelter Project* (NUSP) Di Wilayah Kumuh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kelurahan Bram Itam Kiri adalah: Faktor Internal Masyarakat meliputi: Usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan dan penghasilan/pendapatan. Faktor usia dengan persentase partisipasi terbesar usia 30-39 tahun yaitu 48.7%. Ditemukan ada hubungan antara faktor usia dengan semua bentuk partisipasi yaitu bentuk ide, bentuk uang, bentuk tenaga, bentuk material dengan semua nilai *p-value* di bawah 0.05 (<0.05), dan ada hubungan antara faktor usia dengan semua tingkat partisipasi yaitu tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi/ monitoring dengan *p-value* semua di bawah 0,05 (<0.05), Faktor jenis kelamin responden yang terbesar adalah laki-laki 71.8%. Ditemukan ada hubungan antara faktor jenis kelamin dengan partisipasi bentuk ide, bentuk uang dengan ,tenaga, bentuk material dengan *p-value* di bawah 0,05 (<0.05), ada hubungan antara faktor jenis kelamin dengan tingkat partisipasi dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi/ monitoring, tahap pemanfaatan hasil dengan *p-value* (<0.05), faktor pendidikan responden terbanyak pada tingkat pendidikan SD-SMP/MTS 46.2%. Ditemukan ada hubungan antara faktor pendidikan dengan partisipasi bentuk ide, bentuk uang, bentuk tenaga, bentuk material dengan semua nilai *p-value* (<0.05), dan ada hubungan antara faktor pendidikan dengan tingkat partisipasi dalam tahap perencanaan, tahap evaluasi/ monitoring, tahap pemanfaatan hasil dengan semua nilai *p-value* (<0.05), faktor jenis pekerjaan sebagian besar yaitu bekerja sebagai petani 41.0%. Ditemukan ada hubungan antara faktor pekerjaan dengan semua bentuk yaitu partisipasi bentuk ide, bentuk tenaga, bentuk material dengan *p-value* (<0.05), dan ada hubungan antara faktor pekerjaan dengan semua tingkat partisipasi yaitu dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi/ monitoring, tahap pemanfaatan hasil dengan semua nilai *p-value* (<0.05), dan faktor penghasilan diperoleh penghasilan responden terbanyak 48.7% pada 1.500.000-2.500.000. Ditemukan ada hubungan antara faktor penghasilan dengan semua bentuk partisipasi yaitu bentuk ide, bentuk uang, bentuk tenaga, bentuk material dengan *p-value* 0.007

(<0.05), dan ada hubungan antara faktor penghasilandengan semua tingkat partisipasi yaitu dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap evaluasi/ monitoring, tahap pemanfaatan denganhasil semua nilai-p-value (<0.05).

Faktor Eksternal masyarakat diketahui bahwa responden yang mengatakan bahwa kepemimpinan stakeholder yaitu: pemerintah daerah, pengurus desa/kelurahan (RT/RW), tokoh masyarakat atau tokoh adat dan konsultan pendamping berpengaruh terhadap berpartisipasi masyarakat menempati frekuensi tertinggi sebanyak 38.5% berada kategori aktif.

Saran

Melihat tingkat partisipasi masyarakat dalam Program *Neighborhood Upgrading And Shelter Project* (NUSP) Di Wilayah Kumuh Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kelurahan Bram Itam Kiri masih dalam kategorinya sedang, maka perlu adanya upaya-upaya oleh pemerintah daerah untuk merangsang masyarakat untuk berpartisipasi sebagai bagian dari proses pembangunan berkelanjutan. Salah satu contoh yang perlu ditempuh adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih cara bagaimana mereka mau berpartisipasi dalam pembangunan. Berdasarkan hubungan antara bentuk, tingkat partisipasi masyarakat terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasinya dalam Program *Neighborhood Upgrading And Shelter Project* (NUSP), dengan hasil penelitian ini disarankan kepada pemerintah Kecamatan Tanjung Jabung Barat perlu di tingkatkan perhatian dan pembinaan terhadap masyarakat yang berpenghasilan rendah, khususnya yang mata pencaharian sebagai petani agar taraf hidup mereka meningkatmenjadi lebih layak sehingga kesempatan berpartisipasi mereka dalam pembangunanbisa lebih tinggi.

Daftar Pustaka

- Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. (2014).
- Direktorat Jendral Cipta Karya. (2015). Panduan Umum Program NUSP. Jakarta.
- Dirjen Perumahan dan Permukiman. (2002). Pengelolaan tanah untuk pembangunan perumahan dan pemukiman dalam kerangka penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kab/kota. Makalah Lokakayra Wewenang Pemerintah Dalam rangka Otonomi Daerah. Jakarta.
- Direktur Permukiman dan Perumahan, Kementerian PPN/Bappenas. (2016). Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Permukiman untuk Perkotaan Berkelanjutan. Jakarta.
- Kunarjo.(2002). PerencanaandanPengendalian Program Pembangunan. Jakarta: UI Press .
- Profil Kelurahan Bram Itam Kiri.(2015).
- Wahyudi & Prakoso.(2008). Manajemen Konflik Dalam Organisasi. Bandung: Alfabeta.
- Waston, M. (2013). Dampak Urbanisasi Terhadap Pemukiman Kumuh (Slum Area) Di Daerah Perkotaan. JUPIIS (vol 5 no 2, pp 39-47). Medan: UNIMED.